

Article

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Melalui Program Penanggulangan Kekumuhan Perkotaan Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Joko Setyoko 1*, Adryan Ulil Ulhaq 2

12 Universitas Muara Bungo, Indonesia

*Correspondence Author: leohisbullah@gmail.com

Abstract: Based on the Decree of the Regent of Merangin Number 49/Perkim/Year 2020 concerning the determination of the location of housing and slum settlements in Merangin Regency reaching 321.58 hectares spread over 3 Sub-Districts including Pematang Kandis Sub-District, Pasar Bangko Sub-District, and Pasar Atas Bangko. And in the process, the Pematang Kandis sub-district was chosen. This study aims to be able to describe how the KOTAKU program works, to know the types of roads that will be built in the Pematang Kandis Village and what are the obstacles during the implementation of road construction in the Pematang Kandis Village. In this study, researchers used qualitative research methods with descriptive research, namely descriptive research aimed at accurately describing the characteristics of an individual, condition, symptom, or certain group or to determine the frequency of certain relationships between a symptom and other symptoms in society in research. it can be concluded that the implementation of the KOTAKU program is carried out systematically, namely from the preparation stage, the planning stage and the implementation stage. In the construction of the road, a survey was carried out in advance taking into account the technicalities in the field, the conditions in the field and so on and with joint deliberations the decision to build a concrete road was obtained and the inhibiting factors for the city without slums program in the Pematang Kandis sub-district were very diverse, both internally and externally. So that going forward, women should be involved in activity planning and more outreach by all RT heads so that all residents get information about the KOTAKU program.

Keywords: KOTAKU, Slum Management, Road

Abstrak: Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 49/Perkim/Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Merangin mencapai 321,58 Hektar yang tersebar di 3 Kelurahan Diantaranya Kelurahan Pematang Kandis, Kelurahan Pasar Bangko, dan Pasar Atas Bangko. Dan dalam pengerjaannya dipilihlah kelurahan Pematang kandis. Penelitian ini bertujuan agar dapat menguraikan bagaimana cara kerja program KOTAKU, Mengetahui jenis jalan yang akan dibangun di Kelurahan Pematang Kandis dan kendala apa saja saat pelaksanaan pembangunan jalan di Kelurahan Pematang Kandis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan secara sistematis yaitu dari tahapan persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Dalam pembangunan jalan dilakukan survei terlebih dahulu dengan mempertimbangkan teknis dilapangan, kondisi dilapangan dan lain sebagainya serta dengan musyawarah bersama didapat keputusan pembangunan jalan beton dan untuk faktor penghambat program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang kandis sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. Sehingga kedepannya hendaknya melibatkan perempuan dalam perencanaan kegiatan dan sosialisasi yang lebih lagi oleh seluruh ketua RT sehingga seluruh warga mendapatkan informasi tentang program KOTAKU.

Kata Kunci: KOTAKU, Penanggulangan Kekumuhan, Jalan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Urbanisasi di Indonesia meningkat sangat pesat. Pada tahun 1920, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan hanya sekitar 5,8% dari seluruh penduduk yang ada. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995, pada tahun tersebut tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 35,91%. M, pertambahan penduduk diperkotaan di Indonesia sekitar 65 % disebabkan oleh migrasi dan reklassifikasi. Hanya sebesar 35 % yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri (Kaushal & Mahajan, 2021; Shekhar, 2020). Proyeksi yang dilakukan sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 55,19% Jika dikaji lebih mendalam, tampak nyata bahwa tingkat urbanisasi di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan di luar Pulau Jawa Permasalahan-permasalahan yang ada dalam permukiman kumuh sifatnya beragam, ada yang dikarenakan infrastruktur yang buruk ada juga karena hanya perilaku masyarakat yang kurang peduli di dalam permukiman yang sehat (Alam & Mondal, 2019; Surya et al., 2020; Zalzala et al., 2015).

Permukiman kumuh ini diartikan merupakan permukiman yang tidak layak huni akibat tidak adanya keteraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Nowreen et al., 2022; Zain et al., 2018). Aspek penting permukiman kumuh ini terdiri dari tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana yang terdapat di suatu permukiman kumuh. Salah satu parameter untuk mengukur permukiman kumuh tersebut dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang dimaksudkan seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik (de Wit, 2010; Ibidunni Awosusi et al., 2012; Onditi et al., 2020).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas pemukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan program KOTAKU diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Dalam pencapaian program KOTAKU menerapkan target Seratus Kosong Seratus (100 0 100). Maksud dari target tersebut 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi yang baik (Akter et al., 2021; Khan et al., 2022; Shermin & Rahaman, 2021).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45% (Agestika et al., 2022; Alvarez & Cardenas, 2019; Bardhan et al., 2019; Chakravarthy et al., 2019; Surya et al., 2021).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 49/Perkim/Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Merangin mencapai 321,58 Hektar yang tersebar di 3 Kelurahan Diantaranya Kelurahan Pematang Kandis, Kelurahan Pasar

Bangko, dan Pasar Atas Bangko.

Di 3 Kelurahan tersebut ditetapkan skala prioritas dalam penanganan permukiman kumuh,yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

No	Kawasan	Luas kawasan Kumuh (ha)	Keterangan	Alokasi Dana
1	Kelurahan Pematang Kandis	186,08	Kumuh Ringan	1 Milyar
2	Kelurahan Pasar Bangko	41,82	Kumuh Ringan	1 Milyar
3	Kelurahan Pasar Atas Bangko	93,68	Kumuh Ringan	1 Milyar

Sumber: Dok, Keputusan Bupati Merangin Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Merangin tahun 2020

3 kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh yang ditunjukkan tabel 1.1 diatas, peneliti tertarik pengambilan lokasi penelitian di Kawasan Kelurahan Pematang Kandis dikarenakan kawasan tersebut terdapat luasan kumuh yang lebih banyak dibandingkan kawasan lainnya.

Berbagai macam karakteristik dalam penentuan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut (Meredith & MacDonald, 2017; Rigon, 2014; Shekhar, 2020; Vasudha & Deepa, 2023):

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - 1) Jalan Lingkungan;
 - 2) Drainase Lingkungan;
 - 3) Penyediaan Air Bersih/Minum;
 - 4) Pengelolaan Persampahan;
 - 5) Pengelolaan Air Limbah;
 - 6) Pengamanan Kebakaran; dan
 - 7) Ruang Terbuka Publik.

Melihat dari kondisi sarana dan prasana di kelurahan pematang kandis, peneliti berfokus pada sarana dan prasarana jalan di lingkungan Kelurahan Pematang Kandis. Untuk mengetahui Peningkatan prasarana Jalan Lingkungan setelah adanya program KOTAKU yang dilakukan di Kelurahan Pematang Kandis, maka melalui penelitian ini dan hasil dari penelitian dapat menjadi masukan untuk perbaikan program dimasa yang akan datang. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA JALAN MELALUI PROGRAM PENANGGULANGAN KEKUMUHAN PERKOTAAN KELURAHAN PEMATANG KANDIS KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN**

TINJAUAN PUSTAKA

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Semakin meluasnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan mendorong pemerintah untuk terus mengaktualisasi program penanganannya, salah satunya terwujud melalui program 100-0-100 yakni 100 persen sanitasi layak, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen sarana air minum. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah membentuk lagi program turunan dari program 100-0-100, dalam hal ini 0 persen pemukiman kumuh di wujudkan dalam program KOTAKU (kota tanpa kumuh). Kotaku sendiri di nakhodai oleh pemda dengan leading sector dinas perumahan dan kawasan pemukiman (DISPERKIM) yang juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan baik aktor maupun sector serta melibatkan peran serta masyarakat. Pada awalnya program KOTAKU di jalankan oleh dinas pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan (DPUPPB) namun

seiring dengan perubahan STOK yang baru yang berubah pada januari 2017 maka kewenangan di pindahkan kepada DISPERKIM. Peta sebaran lokasi kumuh kotaku sendiri di indonesia mencapai 23.565 Ha (Hwang & Feng, 2020; Surya et al., 2020; Wagle, 2022).

Tujuan Program Kotaku

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara, yaitu: (1) menurunnya luas permukiman kumuh; (2) terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; (3) tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (4) meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan (5) terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh (AbdelWarith et al., 2014).

Penanganan Permukiman Kumuh dengan Program KOTAKU

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru (Akpabio et al., 2021; Auerbach & Thachil, 2021; Hövel & Gehrke, 2022; Takyi et al., 2021). Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

Pencegahan.

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi (Denaldi & Ferrara, 2018; Eneh, 2021; Mekawy, 2012; Nakamura, 2017).

Peningkatan Kualitas.

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Kota / Perkotaan

Pengertian kota menurut Mulyono kota bisa berarti dua hal yang berbeda yaitu:

a. Umum

Kota dalam pengertian umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis pembangunan tahan nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. Intensitas penggunaan tanah yang tinggi ditunjukkan oleh ukuran unit penggunaan tanah yang umumnya lebih kecil dibandingkan oleh unit penggunaan tanah perdesaan.

b. Administrasi

Wilayah kota secara administratif tidak selalu merupakan daerah terbangun perkotaan (urban), tetapi umumnya masih mempunyai bagian wilayah yang mempunyai ciri perdesaan (rural). Wilayah administratif pemerintahan kota dikelola oleh pemerintah kota bersifat otonom dan kependudukannya sejajar dengan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan kota dikepalai oleh walikota, sedangkan pemerintah kabupaten dikepalai oleh bupati.

Menurut Hadi Sabari dalam memahami pengertian kota ada enam pandangan yang dapat dijadikan acuan yaitu:

a. Juridis Administrasi

Kota dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dimana keberadaannya ditentukan oleh undang-undang (peraturan tertentu), daerah mana dibatasi oleh batas-batas administratif yang jelas keberadaannya diatur oleh UndangUndang/peraturan tertentu dan ditetapkan berstatus sebagai kota dan berpemerintahan tertentu dengan hak dan kewajiban dalam mengatur wilayah kewenangannya.

b. Morfologis

Suatu kota dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan nonpertanian, pemanfaatan lahan mana sebagian besar tertutup oleh bangunan baik bersifat residensial maupun non residensial (secara umum tutupan bangunan/building coverage lebih besar dari tutupan vegetasi/vegetation coveraga), kepadatan bangunan khususnya perumahan yang tinggi, pola jaringan jalan yang kompleks, dalam satuan permukiman yang kompak (contiguous) dan relatif lebih besar dari satuan permukiman kedesaan di sekitarnya. Sementara itu daerah bersangkutan sudah/mulai terjamah fasilitas kota.

c. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Kota adalah daerah tertentu dalam suatu wilayah yang mempunyai aglomerasi jumlah penduduk minimal yang telah ditentukan dan penduduk mana bertempat tinggal pada suatu permukiman. Jumlah penduduk minimal juga dikenal dengan istilah urban population threshold yang berarti jumlah penduduk ditentukan oleh suatu nega untuk mengidentifikasi suatu aglomerasi penduduk sebagai suatu kota.

d. Kepadatan Penduduk

Kota adalah suatu daerah dalam wilayah negara yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu, kepadatan penduduk yang tercatat dan teridentifikasi pada suatu permukiman.

e. Wilayah Organik

Istilah lain dari wilayah organik adalah wilayah fungsional, wilayah heterogen, dan wilayah nodal. Wilayah organik adalah suatu bagian tertentu dari permukaan bumi yang dicirikan oleh suatu kesatuan sistem kegiatan yang mempunyai keterkaitan fungsional satu sama lain yang terjalin sedemikian rupa serta mempunyai satu atau lebih simpul kegiatan. Lokasi dari simpul kegiatan ini kemudian dikenal sebagai kotak karena di dalamnya terkonsentrasi berbagai kegiatan yang beraneka, dan kota mempunyai fungsi sebagai kolektor maupun distributor barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal dalam wilayah yang dimaksud.

f. Sosial-Ekonomi

Menurut Amirudin suatu tempat dikatakan kota jika memiliki ciri-ciri ukurannya relatif besar, padat, hubungan sosialnya heterogen.

Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme dan enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi , wawancara, dan dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif,analisisdata bersifat *induktif/kualitatis* dan hasil peneitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Metode penelitian kualitatif dengan penleitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

JENIS DATA

Jenis data menurut derajat sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian.

Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data dapat berupa wawancara atau observasi . data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi actual ketika peristiwa terjadi

Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode yang mampu mengungkap data sesuai dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selain berasal dari ketiga hal tersebut, juga memanfaatkan data dari buku, jurnal, dan surat kabar. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur artinya wawancara yang dilakukan sudah menetapkan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, sehingga pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengamatan melalui

cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi, mengamati untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap sebuah kasus. Keberadaan dokumentasi tidak dapat dikesampingkan dalam penelitian kualitatif, meskipun aplikasinya perlu dilengkapi dengan teknik pengumpulan data lain. Menurut Moleong bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam sebuah penelitian dokumen menjadi penting karena melalui dokumen penelitian dapat menimba pengetahuan bila dianalisis dengan cermat.

Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian dari rancangan riset, bagian dari tinjauan pustaka, bagian dari pembentukan teori, bagian dari pengumpulan data, bagian dari pengurutan data, pengarsipan dan pembacaan data, dan bagian dari hasil penelitian. Dalam menganalisis data metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis model interaktif yang berlangsung terus menerus hingga tuntas.

3.6. Teknik Pengumpulan Informasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kira harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

No	Nama	Keterangan
1	Dwi Cahyo Hartono,S.STP	Lurah Pematang Kandis
2	Sugeng Priyono S.Sos	Senior Fasilitator Program KOTAKU
3	Marzuki.S.Ag.MM	Koordinator BKM Kandis Hidayah
4	Nasrim.T.ST	Ketua KSM Peduli Lingkungan
5	Rizky Hedwar, S.E	Fasilitator Ekonomi
6	Dwi Kurnia Fasari, S.T	Fasilitator Teknik
7	Hasan	Warga Kelurahan Pematang Kandis
8	Yuniarti	Warga Kelurahan Pematang Kandis
Total		8 Orang

PEMBAHASAN

Tahapan Penyelenggaraan Program

Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dalam pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Pematang Kandis meliputi dua kegiatan utama, yaitu:

- (1) sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya,
- (2) Pembentukan/Penguatan TIPP

Dalam pelaksanaan pemetaan daerah kumuh dilakukan Rembug Kesiapan Masyarakat. Yang berfungsi untuk membangun kepedulian seluruh pelaku menukseskan kegiatan penataan permukiman. utamanya penanganan permukiman kumuh, pengumuman relawan yang mendaftar, dan pernyataan komitmen keikutsertaan dalam program KOTAKU. Komitmen tersebut antara lain:

- (1) Menurunkan luasan permukiman kumuh menjadi 0 ha kumuh pada tahun 2019;
- (2) Mencegah munculnya permukiman kumuh baru
- (3) Partisipasi aktif seluruh pelaku kelurahan/desa;
- (4) Relawan dan agen sosialisasi;
- (5) Swadaya;

- (6) Mengikuti seluruh tahapan Program KOTAKU; dan
- (7) Lainnya.

Tahap Perencanaan

Tahap ini adalah tahapan kedua setelah tahap persiapan dari Program KOTAKU di Kelurahan Pematang Kandis. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. Pemetaan Swadaya (PS)

Kegiatan pada tahap ini adalah pemetaan swadaya. Pada pemetaan swadaya Lurah, BKM, KSM dan TIPP yang didampingi oleh tim fasilitator melakukan kajian dengan metode rembug dan survei. Pemetaan Swadaya (PS) bertujuan untuk tergalangnya partisipasi masyarakat agar aktif bersama dalam kegiatan Program KOTAKU dan agar mengetahui kondisi lingkungan yang akan diadakannya Kegiatan Program KOTAKU.

b. Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat dokumen perencanaan kelurahaan yang disusun oleh TIPP bersama BKM yang di dampingi oleh tim fasilitator. RPLP sendiri berisi tentang rencana program kegiatan selama 1 tahun kedepan pembuatan RPLP dilakukan melalui rembug warga melalui penyusunan perencanaan yang akan dilakukan selama 1 tahun kedapannya.

c. tahap perencanaan teknis (DED)

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan perencanaan penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP). Di tahap ini dilakukan penyusunan Pra Desain dan penyusunan Desain teknis. Mendesain DED itu mempertimbangkan aspek-aspek infrastruktur yang dapat dibangun sesuai dengan Program KOTAKU dengan mempertimbangkan hal lain sebagainya. Dan penyusunan RAB dan membuat gambar rencana teknis jalan atau rencana desain jalan itu dilakukan dengan sesuai Juknis dari Program KOTAKU itu sendiri.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksana dalam kegiatan tahapan pelaksanaan ini adalah dari Tim Inti Perencana Partisipatif, Lurah, BKM Pematang Kandis serta Unit Pengelola Lingkungan yang telah didampingi oleh tim fasilitator KOTAKU. Peserta kegiatan ini adalah dari panitia pelaksana dan pemateri dari kegiatan ini adalah tim teknis pemerintah daerah dengan menggunakan metode pelatihan, pertemuan, FGD dan kegiatan inovatif lainnya. kegiatan tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan pembangunan Jalan di Kelurahan Pematang Kandis yang sesuai dengan kriteria standar pembangunan Jalan dari KOTAKU.

Pembangunan Jalan di Kelurahan Pematang Kandis

Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan bagaimana KOTAKU Memilih kondisi jalan yang mesti diperbaiki. Seperti yang diketahui tim melakukan survey kondisi jalan yang telah direkomendasikan oleh ketua RT terlebih dahulu. Diketahui dalam merencanakan pembangunan jalan mesti di perhatikan beberapa hal berikut :

1. Lokasi titik awal dan titik akhir

Survey ini dilakukan untuk memastikan lokasi yang akan dibangun dan juga menentukan titik awal dan titik akhir dari pembangunan

2. Kondisi lahan

Survey ini juga dilakukan untuk mengetahui struktur tanah yang akan dilakukan pembangunan , jenis tanahnya,dan kondisi tanah.

3. Kondisi eksisting infrastruktur yang ada

Dalam menentukan jalan penulis melihat terdapat berbagai kondisi jalan yang menjadi bahan pertimbangan seperti di RT 13, jalan yang diajukan disana merupakan jalan tanah yang mana daerah di sana merupakan daerah pemukiman baru yang kebanyakan penduduk baru pindah di daerah tersebut. Penulis juga melakukan survey jalan ke beberapa RT seperti RT 14, RT 18, dan RT 29 disini penulis menemukan kondisi jalan yang menurut penulis jalan ini layak untuk di perbaiki yaitu RT 14 dimana jalan di RT. 14 merupakan jalan berbatu dan berlubang dan di sekitaran jalan tersebut dan padat perumahan warga.warga disekitaran jalan tersebut juga mengatakan bahwa mereka telah lama mengajukan untuk pembangunan jalan kepada ketua RT tetapi hingga sekarang

belum juga ada perbaikan pada jalan tersebut. Penulis pun menanyakan hal tersebut ke tim KOTAKU yang ternyata mereka tidak mendapat pengajuan perbaikan jalan di RT 14.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Pematang Kandis

1. Karakter Masyarakat yang Beragam

Karakteristik masyarakat Kelurahan Pematang Kandis dalam pengamatan di lapangan sangat heterogen atau beragam. Kenyataan inilah yang kemudian mempengaruhi faktor penghambat Program KOTAKU, karena tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi. Faktor apatis atau rendahnya kepedulian menjadi penyebab terkendalaanya program KOTAKU tersebut. Efek dari hal ini adalah akan mempengaruhi pemetaan swadaya yang tidak merata atau kurang valid. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen, tentunya akan menimbulkan pendekatan yang berbeda-beda seperti pendekatan kultural yang harus menyesuaikan dengan latar belakang kebudayaan masyarakat yang ada di Pematang Kandis, sehingga penjelasan-penjelasan dan sosialisasi program KOTAKU akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

2. Faktor Kondisi Pengerjaan di Lapangan

Faktor penghambat program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pematang Kandis sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi. Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dalam masyarakat itu sendiri (internal) yaitu kemampuan dan kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Pematang Kandis

Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Pematang Kandis berperan aktif dalam proses berlangsungnya Program KOTAKU khususnya adalah pemerintah desa seperti: Camat, Lurah, sekertaris Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Relawan KOTAKU, RT dan RW setempat, Karang taruna, serta tokoh agama. Masyarakat sangat berperan aktif dalam pembuatan peta swadaya masyarakat yang merupakan skala prioritas pada program ini. Tanpa adanya peta swadaya maka akan terhambatnya pengerjaan program dan tidak dapat mengetahui daerah yang memang dibutuhkan perbaikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh manghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu, semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu akan lebih baik. Khusus untuk BKM Kandis Hidayah tentunya diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan sebagai laporan pertanggung jawaban. Masyarakat boleh mengawasi semua proses tahapan-tahapan didalam program KOTAKU ini, tetapi terkhusus untuk BKM mereka sangat diharapkan untuk terus mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung kerena yang tau persis perkembangannya. Setelah pelaksanaan Program KOTAKU selesai, partisipasi masyarakat dalam menilai atau evaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Pada tahap ini masyarakat memperoleh hasil dari program KOTAKU. Tahap penerima hasil ini merupakan wujud dalam partisipasi, partisipasi pada tahap ini dengan melibatkan masyarakat pada tahap pemanfaatan Program KOTAKU.

Melakukan Edukasi kepada Masyarakat secara Persuasif

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mendukung implementasi program KOTAKU adalah dengan cara melakukan pendekatan persuasif di dalam mengedukasi masyarakat Kelurahan Pematang Kandis mengenai akan pentingnya sebuah lingkungan yang bersih. Guna menumbuhkan kesadaran ini, pihak kelurahan Pematang Kandis adakalanya mengundang masyarakat dan para tokoh masyarakat setempat ke aula kantor kelurahan untuk mendengarkan sosialisasi dari para fasilitator di dalam menjelaskan urgensi lingkungan yang bersih dan sehat bagi

kepentingan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang Kandis dilakukan secara sistematis yaitu: di awali dengan tahapan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan, lalu tahapan pelaksanaan. Guna menyusun pelaksanaan KOTAKU dengan sistematis, maka penanggung jawab membuat rundown kegiatan sebelum terjun ke lokasi yang akan mendapatkan manfaat dari program KOTAKU tersebut.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang kandis sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. Misalnya: Adanya faktor karakter masyarakatnya yang beragam dan kemalasan masyarakat Kelurahan Pematang Kandis di dalam memberikan kontribusi positif terhadap program KOTAKU.
3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang Kandis yaitu dengan cara: melibatkan segenap unsur masyarakat yang ada dalam beberapa aspek kegiatakan KOTAKU seperti dalam hal: pengambilan keputusan, dalam tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, bahkan sampai pada tahap pengambilan manfaat dari program KOTAKU.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kedepan ada perlibatan perempuan dalam perencanaan kegiatan. Bahwa setelah melakukan penelitian di Kelurahan Pematang Kandis hanya bapak-bapak yang diajak untuk merunding setiap ada kegiatan. Hal ini akan dikhawatirkan akan menjadi bias gender dalam pembangunan.
2. Menumbuhkan kekompakan pada lingkungan masyarakat. Tidak saja mengandalkan bapak RT atau RW untuk mengingatkan dalam membersihkan lingkungan. Bahwa setelah melakukan penelitian di Kelurahan Pematang Kandis setiap kali ada kegiatan gotong-royong selalu mengandalkan ajakan dari Bapak RW atau RT saja.
3. Respon masyarakat terhadap program KOTAKU yang sangat antusias dalam membenahi kawasan dan lingkungan hidup mereka perlu untuk dipertahankan. Dan apabila program tersebut telah selesai, hendaknya masyarakat mempertahankan hal tersebut untuk menjadi kultur sehat yang baik di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdelWarith, K. A., Anastasopoulos, P. C., Richardson, W., Fricker, J. D., & Haddock, J. E. (2014). Design of local roadway infrastructure to service sustainable energy facilities. *Energy, Sustainability and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/2192-0567-4-14>
- Agestika, L., Sintawardani, N., Hamidah, U., Nyambe, S., & Yamauchi, T. (2022). Pattern of child faeces management and disposable diaper usage among under-fives in an Urban Slum of Bandung, Indonesia. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*, 12(1), 32–40. <https://doi.org/10.2166/washdev.2021.099>
- Akpabio, E. M., Wilson, N.-A. U., Essien, K. A., Ansa, I. E., & Odum, P. N. (2021). Slums, women and sanitary living in South-South Nigeria. *Journal of Housing and the Built Environment*, 36(3), 1229–1248. <https://doi.org/10.1007/s10901-020-09802-z>
- Akter, S., Hakim, S. S., & Rahman, M. S. (2021). Planning for pandemic resilience: COVID-19 experience from urban slums in Khulna, Bangladesh. *Journal of Urban Management*, 10(4), 325–344. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.08.003>
- Alam, M. S., & Mondal, M. (2019). Assessment of sanitation service quality in urban slums of Khulna city based on SERVQUAL and AHP model: A case study of railway slum, Khulna, Bangladesh. *Journal of Urban Management*, 8(1), 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.08.002>
- Alvarez, M. K., & Cardenas, K. (2019). Evicting Slums, 'Building Back Better': Resiliency Revanchism

Joko Setyoko^{1*}, Adryan Ulil Ulhaq²

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Melalui Program Penanggulangan Kekumuhan

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 12-23

- and Disaster Risk Management in Manila. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(2), 227–249. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12757>
- Auerbach, A. M., & Thachil, T. (2021). How does Covid-19 affect urban slums? Evidence from settlement leaders in India. *World Development*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105304>
- Bardhan, R., Sunikka-Blank, M., & Haque, A. N. (2019). Sentiment analysis as tool for gender mainstreaming in slum rehabilitation housing management in Mumbai, India. *Habitat International*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102040>
- Chakravarthy, V., Rajagopal, S., & Joshi, B. (2019). Does Menstrual Hygiene Management in Urban Slums Need a Different Lens? Challenges Faced by Women and Girls in Jaipur and Delhi. *Indian Journal of Gender Studies*, 26(1-2), 138–159. <https://doi.org/10.1177/0971521518811174>
- de Wit, J. (2010). Decentralised management of solid waste in Mumbai slums: Informal privatisation through patronage. *International Journal of Public Administration*, 33(12), 767–777. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.514450>
- Denaldi, R., & Ferrara, L. N. (2018). The environmental dimension of slum upgrading. *Ambiente e Sociedade*, 21. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0195r0vu18l1ao>
- Eneh, O. C. (2021). Abuja slums: development, causes, waste-related health challenges, government response and way-forward. *Environment, Development and Sustainability*, 23(6), 9379–9396. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01030-3>
- Hövel, E. D., & Gehrke, M. (2022). COVID-19 LED TO PRICE SLUMPS IN THE GERMAN STOCK MARKET. IS SENTIMENT APPLICABLE AS AN EXPLANATORY FACTOR? *Argumenta Oeconomica*, 2022(1), 5–28. <https://doi.org/10.15611/aoe.2022.1.01>
- Hwang, Y. H., & Feng, Y. (2020). 12 years after: lessons from incremental changes in open spaces in a slum-upgrading project. *Landscape Research*, 45(4), 412–427. <https://doi.org/10.1080/01426397.2019.1673327>
- Ibidunni Awosusi, A., Oriye, O., & Oluranti Owoeye, J. (2012). Waste management and enterprise development in slum communities of Ado-Ekiti, Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 3(11), 579–590. <https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n11p579>
- Kaushal, J., & Mahajan, P. (2021). Asia's largest urban slum-Dharavi: A global model for management of COVID-19. *Cities*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103097>
- Khan, M., Wu, Q., Yan, S., & Peng, J. (2022). Data-Driven Urban Management and its Impact on Upgradation of Slums in Islamabad, Pakistan: Mediating Role of Privacy and Security Concerns. *Journal of Urban Planning and Development*, 148(2). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000811](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000811)
- Mekawy, M. A. (2012). Responsible slum tourism: Egyptian experience. *Annals of Tourism Research*, 39(4), 2092–2113. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.07.006>
- Meredith, T., & MacDonald, M. (2017). Community-supported slum-upgrading: Innovations from Kibera, Nairobi, Kenya. *Habitat International*, 60, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.12.003>
- Nakamura, S. (2017). Does slum formalisation without title provision stimulate housing improvement? A case of slum declaration in Pune, India. *Urban Studies*, 54(7), 1715–1735. <https://doi.org/10.1177/0042098016632433>
- Nowreen, S., Chowdhury, M. A., Tarin, N. J., Hasan, M. R., & Zzaman, R. U. (2022). A participatory SWOT analysis on water, sanitation, and hygiene management of disabled females in Dhaka slums of Bangladesh. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*, 12(7), 542–554. <https://doi.org/10.2166/washdev.2022.061>
- Onditi, F., Obimbo, M., Muchina, S. K., & Nyadera, I. (2020). Modeling a Pandemic (COVID-19) Management Strategy for Urban Slums Using Social Geometry Framework. *European Journal of Development Research*, 32(5), 1450–1475. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00317-5>
- Rigon, A. (2014). Building local governance: Participation and elite capture in slum-upgrading in Kenya. *Development and Change*, 45(2), 257–283. <https://doi.org/10.1111/dech.12078>
- Shekhar, S. (2020). Effective management of slums- Case study of Kalaburagi city, Karnataka, India. *Journal of Urban Management*, 9(1), 35–53. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.09.001>
- Shermin, N., & Rahaman, S. N. (2021). Assessment of sanitation service gap in urban slums for

Joko Setyoko^{1*}, Adryan Ulil Ulhaq²

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Melalui Program Penanggulangan Kekumuhan

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 5 No 1 Tahun 2023, p 12-23

tackling COVID-19. *Journal of Urban Management*, 10(3), 230–241.

<https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.06.003>

Surya, B., Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E. S., & Remmang, H. (2021).

Community empowerment and utilization of renewable energy: Entrepreneurial perspective for community resilience based on sustainable management of slum settlements in Makassar city, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–37.

<https://doi.org/10.3390/su13063178>

Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18).

<https://doi.org/10.3390/SU12187324>

Takyi, S. A., Amponsah, O., Yeboah, A. S., & Mantey, E. (2021). Locational analysis of slums and the effects of slum dweller's activities on the social, economic and ecological facets of the city: insights from Kumasi in Ghana. *GeoJournal*, 86(6), 2467–2481.

<https://doi.org/10.1007/s10708-020-10196-2>

Vasudha, G., & Deepa, J. (2023). Landslide Vulnerability of Urban slums: Case of Warje Slum, Pune, Maharashtra. *Disaster Advances*, 16(3), 44–51.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85148653257&partnerID=40&md5=9855a9d37a52f1ecf6c48b96ee3e7904>

Wagle, P. (2022). Securing human right to water of slum-dwellers in Mumbai, India: Achievements, limitations, and institutional appropriation. *Geoforum*, 132, 1–9.

<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.016>

Zain, D. P., Salman, D., & Baja, S. (2018). Model of slum area management based on socio-spatial approach. The case of Baubau City, Indonesia. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 9(2), 103–115. <https://doi.org/10.24193/JSSP.2018.2.03>

Zalzala, A., Strettle, V., Chia, S., & Zalzala, L. (2015). RFID individual tracking and records management: Solutions for slum communities. *IEEE Technology and Society Magazine*, 34(1), 45–55. <https://doi.org/10.1109/MTS.2015.2395963>